

**KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN  
ADMINDUK  
DI KAB. TEMANGGUNG  
SESUAI PERDA NO. 9 TAHUN 2019**

**Temanggung, 16 Juli 2018**

**PENINGKATAN KUALITAS  
LAYANAN ADMINDUK**



**PERDA NO. 9  
TH 2019**



**REFORMASI SISTEM  
LAYANAN ADMINDUK :  
INOVATIF**



**MENGHAPUS BIROKRASI  
YG BERBELIT BELIT**

# DENDA ADMINISTRATIF DITIADAKAN



# PASAL 8A

**PETUGAS PENGELOLA ADMINDUK  
(Dinas, kecamatan dan instansi terkait)**



**SK Bupati**

**Membantu Bupati & Pejabat Pencatatan Sipil**



**Pelayanan dafduk/capil & kelola informasi Adminduk  
TI & kom**



# PASAL 9 PETUGAS REGISTRASI

SK Bupati

Bantu Lurah/kades dan Dinas

Penerbitan Srt Ket/formulir

Menunggu regulasi baru

Bantu lapor kematian di Dinas (SANKA)

lapor perubahan, pemutakhiran & penyajian data  
penddk (APDK)

# PASAL 48

Keterangan kolom agama bagi  
penghayat di KK dan KTP



Kepercayaan  
Terhadap Tuhan YME

## PASAL 63B

### PRINSIP PELAYANAN DAFTAR DAN CAPIL

a. Memberi kemudahan pengguna & masyarakat

b. Sistem verifikasi & validasi ———> pastikan kebenaran dan keabsahan data penduduk

c. Integrasi dan keterhubungan data antar/lintas instansi

d. Pengelolaan data yg akurat, valid & dpt dipertanggungjawabkan

e. Adaptasi dg perkembangan TI (inovasi)

f. Efisiensi dan efektif (pangkas birokrasi)

# PASAL 63D

Penddk wajib  
lapor peristiwa  
kepend dan  
peristiwa penting

manual

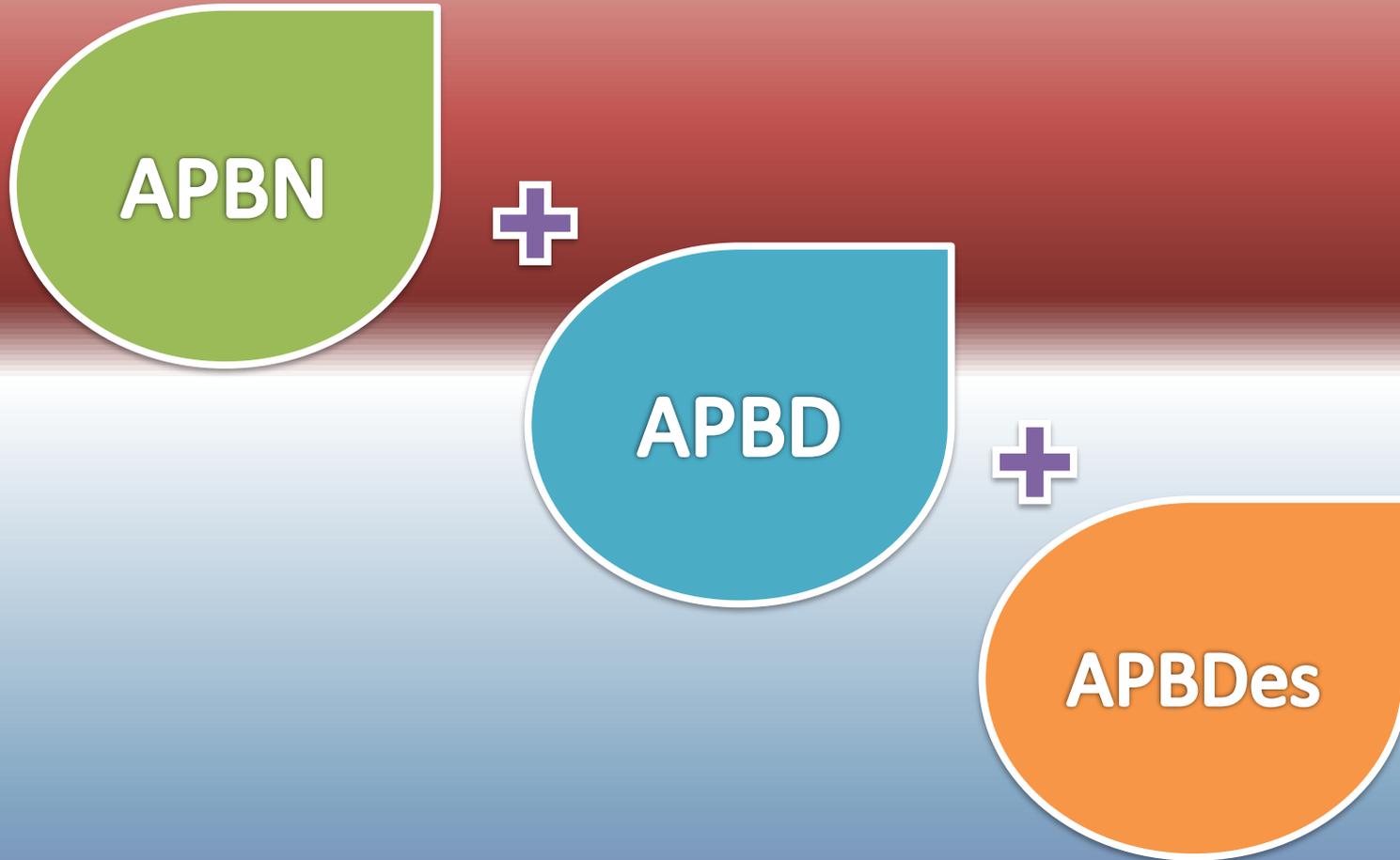
Daring/online

TTE  
(QR code)

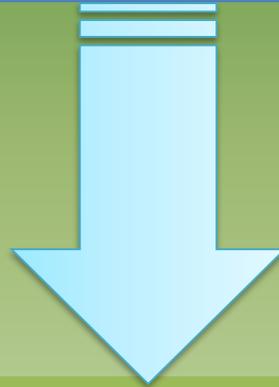
Sah sbg alat verifikasi dan  
autentikasi

## PASAL 68B

# PEMBIAYAAN PEYELENGGARAAN ADMINDUK



**TATA CARA DAN PERSYARATAN  
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN  
PENCATATAN SIPIL**



*dalam proses*

**PERATURAN BUPATI**

*contoh*

## SYARAT PENCATATAN KEMATIAN UMUM

- Form. F.2-29;
- Surat kematian dr dokter/F.2-28;
- Fc. KK.

# PERDA NO. 2 TH. 2015

## Pasal 62 :

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memvasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data penduduk.

## Pasal 76 :

Setiap orang, badan hukum, petugas atau pejabat yang melakukan tindak pidana Administrasi Kependudukan dikenai ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Thank

You